

DIGITAL GOVERNANCE DALAM SEKTOR PERUMAHAN MELALUI EVALUASI IMPLEMENTASI SIPEKAN DI KOTA BATU

Digital Governance in the Housing Sector through the Evaluation of SIPEKAN Implementation in Batu City

Eja Purwanto^{1*}
Imam Bustomi²

¹Universitas Tribhuwana
Tunggadewi, Malang

²Sekolah Tinggi Agama Islam,
Mempawah

*corresponding author:
ejapurwanto83@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman (SIPEKAN) dalam kerangka digital governance di Kota Batu. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPEKAN mampu meningkatkan keterpaduan data, efisiensi pelayanan, serta transparansi informasi perumahan. Sistem ini juga berkontribusi dalam memperkuat kapasitas administrasi pemerintah daerah dan mendukung prinsip *good governance*. Namun demikian, implementasi SIPEKAN masih menghadapi kendala pada aspek pemanfaatan fitur analitik, pengukuran kinerja layanan, integrasi lintas perangkat daerah, serta tingkat adopsi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan roadmap pengembangan guna memastikan keberlanjutan inovasi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian digital governance serta menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sistem informasi sektoral.

Kata Kunci:

Digital governance
SPBE
SIPEKAN
Pelayanan publik
Tata kelola data

Keywords:

Digital governance
E-government
SIPEKAN
Public service
Data governance

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the Housing and Settlement Information System (SIPEKAN) within the framework of digital governance in Batu City. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that SIPEKAN improves data integration, service efficiency, and transparency in housing administration. The system also strengthens administrative capacity and supports the principles of good governance. However, several challenges remain, including limited use of analytical features, lack of quantitative performance indicators, incomplete inter-agency integration, and uneven public adoption. Therefore, strengthening system integration, enhancing human resource capacity, and developing a strategic roadmap are necessary to ensure sustainability. This study contributes to the development of digital governance literature and provides practical insights for local governments in optimizing sectoral information systems.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: [http://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index](https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index)

Submit: 15-04-2026

Accepted: 28-04-2026

Published: 30-04-2026

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik menjadi agenda strategis dalam reformasi birokrasi modern, khususnya melalui penerapan konsep digital governance. *Digital governance* tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan teknologi informasi, tetapi juga sebagai upaya integrasi sistem, data, dan proses pengambilan keputusan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) menjadi fondasi utama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel (Ilham et al., 2025; Rusdy & Flambonita, 2023).

Penerapan SPBE telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan kualitas layanan publik, termasuk dalam aspek kecepatan pelayanan dan transparansi informasi. Namun demikian, implementasi *digital governance* di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis.

Permasalahan seperti fragmentasi sistem, rendahnya interoperabilitas, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam optimalisasi layanan digital pemerintah daerah (Kencono et al., 2024; Andesca & Abdal, 2025).

Selain itu, studi Irwansyah et al. (2025) menegaskan bahwa implementasi SPBE di daerah masih cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif dibandingkan transformasi substantif menuju *digital governance* yang terintegrasi. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan sistem digital sebagai instrumen pengendalian kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif SPBE dan realitas implementasi di lapangan (Irwansyah et al., 2025).

Dalam konteks sektor perumahan dan kawasan permukiman, kebutuhan terhadap sistem informasi yang terintegrasi menjadi semakin penting. Sektor ini memiliki keterkaitan langsung dengan aspek legalitas, tata ruang, serta perlindungan masyarakat, sehingga membutuhkan pengelolaan data yang akurat dan mutakhir. Tanpa dukungan sistem informasi yang memadai, pengelolaan perumahan berpotensi menghadapi permasalahan seperti ketidakterpaduan data, lambatnya pelayanan administrasi, serta rendahnya transparansi informasi kepada publik.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Batu mengembangkan inovasi Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman (SIPEKAN) sebagai bagian dari implementasi *digital governance* di tingkat sektoral. SIPEKAN dirancang untuk mengintegrasikan data legalitas, teknis, dan spasial perumahan dalam satu platform digital yang dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat. Inovasi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari administrasi berbasis dokumen menuju administrasi berbasis data dan pengendalian kebijakan.

Pengembangan sistem informasi sektoral seperti SIPEKAN sejalan dengan temuan Headayetullah et al.

(2011) dan Thowimma et al. (2024) yang menekankan pentingnya integrasi arsitektur sistem dan konsolidasi data dalam mendukung transformasi digital pemerintah daerah. Integrasi sistem mampu mengurangi duplikasi data, meningkatkan interoperabilitas, serta memperkuat efektivitas tata kelola teknologi informasi. Dengan demikian, keberadaan SIPEKAN memiliki potensi strategis dalam memperkuat kapasitas administrasi pemerintah daerah (Headayetullah et al., 2011; Thowimma et al., 2024).

Meskipun demikian, implementasi sistem digital tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu dievaluasi secara komprehensif. Studi implementasi digital menunjukkan bahwa evaluasi implementasi SPBE penting dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan guna meningkatkan efektivitas sistem digital pemerintahan (KemenPAN-RB, 2024).

Permasalahan yang muncul dalam implementasi SIPEKAN di Kota Batu meliputi belum optimalnya pemutakhiran dan standarisasi data, belum tersedianya indikator kinerja kuantitatif yang terukur, serta keterbatasan pemanfaatan fitur analitik sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, integrasi lintas perangkat daerah dan pemanfaatan sistem oleh masyarakat juga masih belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun SIPEKAN telah memberikan kontribusi positif, masih terdapat ruang perbaikan dalam implementasinya.

Permasalahan tersebut sejalan dengan temuan Mergel et al. (2019;) dan Wardana et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan *digital governance* sangat ditentukan oleh integrasi sistem, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga. Tanpa penguatan pada aspek tersebut, implementasi sistem digital berpotensi tidak berjalan optimal dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola

pemerintahan (Mergel et al., 2019; Wardana et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SIPEKAN dalam kerangka *digital governance* pada sektor perumahan di Kota Batu. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, keterpaduan data, serta transparansi informasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategis dalam rangka penguatan implementasi SIPEKAN agar dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengendalian kebijakan berbasis data. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian *digital governance* serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola sektor perumahan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif evaluatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman (SIPEKAN) dalam kerangka *digital governance* di Kota Batu. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena secara kontekstual, khususnya terkait proses, dinamika kelembagaan, serta persepsi aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan berbasis digital (Creswell, W. John & Creswell, 2018; Moleong, 2018; Yin, 2018).

Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi implementasi SIPEKAN yang mencakup aspek tata kelola data, efisiensi pelayanan, transparansi informasi, serta integrasi lintas perangkat daerah. Penelitian ini tidak hanya menilai capaian implementasi, tetapi juga mengidentifikasi kendala dan peluang pengembangan

sistem dalam mendukung penguatan *digital governance* di sektor perumahan. Dengan demikian, penelitian ini bersifat eksploratif sekaligus evaluatif dalam kerangka administrasi publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang terdiri dari aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu, pengelola sistem SIPEKAN, serta pihak terkait lainnya yang memiliki keterlibatan langsung dalam implementasi sistem. Studi dokumentasi dilakukan terhadap laporan monitoring dan evaluasi, regulasi, serta dokumen pendukung lainnya. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung alur penggunaan sistem dan praktik pelayanan administrasi berbasis SIPEKAN.

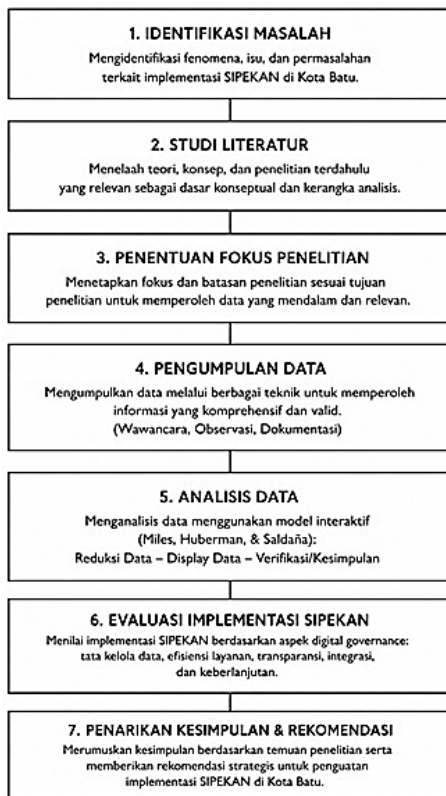
Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Kriteria informan meliputi keterlibatan dalam pengelolaan sistem, pemahaman terhadap kebijakan perumahan, serta pengalaman dalam penggunaan SIPEKAN. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kedalaman dan relevansi terhadap fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles et al. (2014), yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan pola dan temuan yang muncul. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Selain itu, dilakukan juga

member check kepada informan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi peneliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Langkah ini penting untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan hasil penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

Secara sistematis, tahapan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Penelitian
Sumber: diolah peneliti, 2026

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif terkait implementasi SIPEKAN dalam mendukung *digital governance* di sektor perumahan. Pendekatan kualitatif yang digunakan memberikan ruang untuk memahami tidak hanya hasil, tetapi juga proses dan konteks yang melatarbelakangi keberhasilan maupun kendala implementasi sistem.

HASIL

SIPEKAN Kota Batu

Implementasi Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman (SIPEKAN) di Kota Batu menunjukkan

adanya transformasi tata kelola administrasi perumahan menuju sistem berbasis digital. SIPEKAN berfungsi sebagai platform terintegrasi yang memuat data legalitas, teknis, dan spasial perumahan, serta dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat.

Secara visual, antarmuka SIPEKAN menampilkan integrasi layanan dan informasi dalam satu sistem sebagai berikut:



Berdasarkan hasil observasi, sistem ini telah digunakan sebagai rujukan utama dalam proses verifikasi administrasi perumahan, pengawasan pembangunan, serta penyediaan informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa SIPEKAN tidak hanya berfungsi sebagai sistem pencatatan, tetapi juga sebagai instrumen operasional dalam tata kelola sektor perumahan.

Penguatan Tata Kelola Data Perumahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPEKAN berhasil meningkatkan keterpaduan data perumahan yang sebelumnya tersebar di berbagai unit kerja. Data yang terintegrasi meliputi aspek legalitas, lokasi, serta status pembangunan perumahan.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Data Perumahan Sebelum dan Sesudah SIPEKAN

Aspek	Sebelum SIPEKAN	Sesudah SIPEKAN
Keterpaduan Data	Terpisah antar unit	Terintegrasi dalam satu sistem
Aksesibilitas	Terbatas	Terbuka dan mudah diakses
Pemutakhiran Data	Tidak berkala	Mulai terstruktur
Akurasi Data	Berpotensi inkonsisten	Lebih konsisten

Sumber: diolah peneliti, 2026

Hasil wawancara dengan salah satu pengelola sistem menyatakan:

“Dulu data perumahan tersebar di beberapa bagian, sekarang sudah satu pintu melalui SIPEKAN, sehingga lebih mudah dikontrol dan diverifikasi” (Informan 1).

Temuan ini menunjukkan bahwa SIPEKAN telah berkontribusi dalam memperkuat basis data sebagai fondasi pengambilan keputusan kebijakan.

Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Pelayanan

Implementasi SIPEKAN berdampak pada peningkatan efisiensi pelayanan administrasi perumahan. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah terdigitalisasi, sehingga mempercepat alur pelayanan dan mengurangi beban kerja aparatur.

Selain itu, transparansi informasi juga mengalami peningkatan melalui penyediaan data perumahan yang dapat diakses oleh masyarakat. Informasi terkait legalitas dan status perumahan dapat ditelusuri secara langsung melalui sistem.

Tabel 2. Dampak Implementasi SIPEKAN terhadap Pelayanan

Indikator	Temuan Hasil Penelitian
Waktu Pelayanan	Lebih cepat dibanding sistem manual
Proses Administrasi	Lebih sederhana dan terstruktur
Transparansi Informasi	Meningkat melalui akses publik

Sumber: diolah peneliti, 2026

Salah satu informan menyampaikan:

“Pelayanan sekarang lebih cepat karena tidak perlu lagi proses manual berulang. Semua sudah bisa dicek di sistem” (Informan 2).

Sementara itu, dari sisi masyarakat:

“Kami bisa melihat status perumahan secara langsung, jadi lebih yakin sebelum membeli” (Informan 3).

Hasil ini menunjukkan bahwa SIPEKAN berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Keterbatasan Implementasi dan Pemanfaatan Sistem

Meskipun memberikan berbagai manfaat, hasil penelitian juga menemukan beberapa keterbatasan dalam implementasi SIPEKAN. Salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan fitur analitik dan dashboard sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Selain itu, pemanfaatan sistem oleh masyarakat belum merata, terutama pada kelompok pengguna yang memiliki keterbatasan literasi digital. Integrasi lintas perangkat daerah juga masih dalam tahap pengembangan.

Tabel 3. Keterbatasan Implementasi SIPEKAN

Aspek	Temuan Utama
Pemutakhiran Data	Belum sepenuhnya konsisten
Indikator Kinerja	Belum terukur secara kuantitatif
Pemanfaatan Analitik	Masih terbatas
Akses Masyarakat	Belum merata
Integrasi Lintas OPD	Belum optimal

Sumber: diolah peneliti, 2026

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara:

“Fitur dashboard sebenarnya sudah ada, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk analisis kebijakan” (Informan 4).

Selain itu:

“Masih perlu sosialisasi ke masyarakat agar lebih banyak yang menggunakan sistem ini” (Informan 5).

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun SIPEKAN telah berjalan dengan baik sebagai sistem layanan, masih diperlukan penguatan pada aspek pemanfaatan dan integrasi untuk mencapai optimalisasi *digital governance*.

PEMBAHASAN

Transformasi Digital Governance melalui Implementasi SIPEKAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPEKAN di Kota Batu merepresentasikan pergeseran paradigma administrasi publik menuju *digital governance* yang lebih terintegrasi. Transformasi ini tidak hanya terbatas pada digitalisasi layanan, tetapi juga

mencerminkan perubahan dalam tata kelola data dan proses pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Mergel et al. (2019) yang menekankan bahwa transformasi digital dalam sektor publik mencakup perubahan organisasi, proses, dan budaya kerja, bukan sekadar adopsi teknologi.

Dalam konteks SPBE, SIPEKAN dapat diposisikan sebagai instrumen konkret dalam mendukung modernisasi birokrasi di tingkat daerah. Andesca & Abdal (2025) menegaskan bahwa keberhasilan SPBE sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan layanan digital dan tata kelola pemerintahan secara sistemik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa SIPEKAN telah mampu mengintegrasikan data legalitas, teknis, dan spasial dalam satu platform, sehingga mendukung efisiensi dan konsistensi administrasi perumahan.

Lebih lanjut, implementasi SIPEKAN juga memperlihatkan adanya pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan strategis berbasis data. Irwansyah et al. (2025) menyebutkan bahwa transformasi *digital governance* yang efektif harus melampaui sekadar kepatuhan administratif dan mampu menjadi instrumen pengendalian kebijakan. Dalam hal ini, SIPEKAN telah menunjukkan fungsi awal sebagai alat pengendali pembangunan perumahan, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal secara analitik.

Selain itu, keberadaan SIPEKAN juga memperkuat prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. SPBE merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akses informasi dan efisiensi layanan (Ilham et al., 2025). Dengan menyediakan akses informasi perumahan kepada masyarakat, SIPEKAN telah berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Namun demikian, transformasi *digital governance* melalui SIPEKAN masih berada pada tahap penguatan. Salah satu tantangan utama dalam implementasi SPBE di Indonesia adalah belum optimalnya integrasi sistem dan pemanfaatan data secara strategis (Kencono et al., 2024). Hal ini tercermin dalam temuan penelitian yang menunjukkan bahwa fitur analitik SIPEKAN belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perumusan kebijakan.

Efektivitas SIPEKAN dalam Meningkatkan Tata Kelola Data dan Pelayanan Publik

Implementasi SIPEKAN terbukti memberikan dampak positif terhadap penguatan tata kelola data perumahan di Kota Batu. Integrasi data dalam satu sistem telah mengurangi fragmentasi informasi yang sebelumnya terjadi antar unit kerja. Hal ini sejalan dengan temuan Thowimma et al. (2024) yang menyatakan bahwa arsitektur sistem informasi yang terintegrasi merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dari perspektif pelayanan publik, SIPEKAN juga menunjukkan peningkatan efisiensi dalam proses administrasi perumahan. Digitalisasi proses verifikasi dan pelayanan telah mempercepat waktu layanan serta mengurangi ketergantungan pada mekanisme manual. Penerapan SPBE dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi (Rusdy & Flambonita, 2023).

Selain itu, peningkatan transparansi menjadi salah satu capaian penting dari implementasi SIPEKAN. Masyarakat kini memiliki akses terhadap informasi legalitas dan status perumahan, yang sebelumnya sulit diperoleh. Hal ini mendukung prinsip keterbukaan informasi publik dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi risiko seperti penipuan perumahan. Transparansi dalam pelayanan publik berbasis digital merupakan indikator penting dalam

mewujudkan good governance di era digital (Wardana et al., 2025).

Hasil wawancara dalam penelitian ini juga memperkuat temuan tersebut, di mana aparaturnya menyatakan bahwa SIPEKAN mempermudah proses verifikasi dan pengawasan, sementara masyarakat merasakan peningkatan kepastian informasi. Temuan ini menunjukkan adanya keselarasan antara persepsi internal pemerintah dan pengalaman eksternal masyarakat terhadap manfaat sistem.

Meskipun demikian, efektivitas SIPEKAN masih menghadapi keterbatasan dalam aspek pengukuran kinerja. Belum adanya indikator kuantitatif yang baku menyebabkan evaluasi efisiensi layanan belum dapat dilakukan secara objektif. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sistem tidak hanya memerlukan pengembangan teknologi, tetapi juga penguatan kerangka evaluasi kinerja.

Tantangan Implementasi dan Keterbatasan Integrasi Sistem

Meskipun SIPEKAN telah menunjukkan capaian yang signifikan, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya integrasi lintas perangkat daerah, yang berdampak pada keterbatasan interoperabilitas sistem. Interoperabilitas dan integrasi vertikal merupakan elemen kunci dalam keberhasilan *digital government*, karena memungkinkan pertukaran data yang efektif antar lembaga (Headayetullah et al., 2011).

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi sistem. Pemanfaatan fitur analitik dan dashboard SIPEKAN masih belum maksimal, yang menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi aparaturnya dalam pengelolaan data dan teknologi informasi. Kesiapan SDM merupakan salah satu faktor krusial dalam

keberhasilan transformasi digital di sektor publik (Kencono et al., 2024).

Dari sisi masyarakat, pemanfaatan SIPEKAN juga belum merata, terutama pada kelompok dengan tingkat literasi digital yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan *digital governance* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh tingkat adopsi dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan Sosialisasi Evaluasi SPBE (2024) menegaskan pentingnya sosialisasi dan edukasi publik dalam meningkatkan pemanfaatan layanan digital pemerintah.

Selain itu, aspek keberlanjutan sistem juga menjadi perhatian penting. Belum adanya roadmap pengembangan jangka menengah dan panjang berpotensi menghambat kesinambungan inovasi SIPEKAN. Andesca & Abdal (2025) menekankan bahwa keberlanjutan SPBE memerlukan dukungan regulasi, perencanaan strategis, serta koordinasi lintas sektor yang kuat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi SIPEKAN tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi berbagai kendala tersebut, termasuk penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan kebijakan pendukung.

Implikasi Strategis terhadap Penguatan Digital Governance di Daerah

Implementasi SIPEKAN memberikan implikasi strategis bagi penguatan *digital governance* di tingkat daerah, khususnya dalam sektor perumahan. Sistem ini menunjukkan bahwa inovasi berbasis teknologi dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, selama didukung oleh integrasi sistem dan pemanfaatan data yang optimal.

Dari perspektif kebijakan, SIPEKAN dapat dijadikan sebagai model praktik baik (*best practice*) dalam

implementasi SPBE sektoral. Hal ini sejalan dengan temuan Wardana et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital di daerah dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan di wilayah lain. Dengan demikian, pengalaman Kota Batu dapat direplikasi dengan penyesuaian konteks lokal.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan evaluatif dalam implementasi sistem digital. Evaluasi dalam penelitian kualitatif tidak hanya bertujuan untuk menilai hasil, tetapi juga untuk memahami proses dan konteks implementasi (Creswell, W. John & Creswell, 2018). Dalam hal ini, evaluasi SIPEKAN memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian dan kendala yang dihadapi.

Implikasi lainnya adalah perlunya penguatan integrasi data dan pemanfaatan analitik sebagai dasar pengambilan keputusan. SIPEKAN memiliki potensi untuk berkembang menjadi sistem pendukung keputusan (*decision support system*) yang mampu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data. Hal ini akan memperkuat fungsi pemerintah daerah dalam mengendalikan pembangunan perumahan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan *digital governance* memerlukan sinergi antara teknologi, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika tersebut, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif (Sugiyono, 2019). Dengan demikian, penguatan SIPEKAN ke depan perlu diarahkan pada integrasi sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan inovasi digital di sektor perumahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman (SIPEKAN) di Kota Batu merupakan langkah strategis

dalam mendorong penerapan *digital governance* pada sektor perumahan. SIPEKAN tidak hanya berfungsi sebagai alat digitalisasi layanan administrasi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola berbasis data yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Integrasi data legalitas, teknis, dan spasial dalam satu platform telah mampu mengurangi fragmentasi informasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan data perumahan.

Dari aspek pelayanan publik, SIPEKAN terbukti memberikan dampak positif terhadap percepatan proses administrasi dan penyederhanaan prosedur layanan. Selain itu, keterbukaan akses informasi kepada masyarakat turut meningkatkan kepastian hukum serta mengurangi potensi risiko seperti penipuan perumahan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi SIPEKAN telah sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam hal transparansi dan perlindungan publik.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi SIPEKAN masih menghadapi beberapa keterbatasan. Pemanfaatan fitur analitik dan dashboard belum optimal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, indikator kinerja layanan belum terukur secara kuantitatif, serta integrasi lintas perangkat daerah masih perlu diperkuat. Selain itu, tingkat pemanfaatan sistem oleh masyarakat belum merata, yang menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan literasi digital.

Secara keseluruhan, SIPEKAN dapat dikategorikan sebagai praktik baik dalam implementasi SPBE sektoral di tingkat daerah. Akan tetapi, untuk mencapai optimalisasi *digital governance* secara berkelanjutan, diperlukan penguatan pada aspek integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan roadmap pengembangan, serta penguatan regulasi pendukung. Dengan langkah tersebut, SIPEKAN berpotensi berkembang menjadi sistem pendukung kebijakan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan sektor perumahan di masa depan..

REFERENSI

- Andesca, C. P., & Abdal, A. (2025). SPBE DAN MODERNISASI BIROKRASI: KAJIAN LITERATUR MENGENAI TANTANGAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL DAN GOVERNANCE DIGITAL. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(9), 2988–1986. <https://cibinstitute.id/index.php/triwikrama/article/view/2755>
- Creswell, W. John & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Headayetullah, M., Pradhan, G. K., Biswas, S., & Puthal, B. (2011). Proposed Information Sharing Security Approach for Security Personnels, Vertical Integration, Semantic Interoperability Architecture and Framework for Digital Government. *International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT)*, 3(3), 120–139. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1107.5397>
- Ilham, A. R., Dewi, Y. S., & Gusty, R. (2025). SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEBAGAI PILAR GOOD GOVERNANCE: REFLEKSI TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM (SPBE) AS A PILLAR OF GOOD GOVERNANCE: A REFLECTION ON LOCAL GOVERNMENT MANAGEMENT. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 23(1), 52–63. <https://doi.org/10.46730/jiana.v23i1.8247>
- Irwansyah, I., Kusuma, A. R., & Irawan, B. (2025). Beyond Compliance: Implementing the Electronic-Based Government System as a *Digital Governance* Transformation Process in East Kalimantan Province. *Jurnal Bina Praja*, 17(2). <https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025-2818>
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7(2), 1498–1506. <https://doi.org/10.54371/jlkip.v7i2.3519>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Fourth Edition. In *The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pelaksanaan Sosialisasi Evaluasi SPBE 2024 Hari Ketiga (2024). <https://kemenpan.go.id/site/berita-foto/pelaksanaan-sosialisasi-evaluasi-spbe-2024-hari-ketiga>
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Lex Lata*, 5(2), 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Thowimma, O., Hanafi, M., & Amrozi, Y. (2024). Information System Architecture in Local Government (A Case Study at XYZ Local Government). *Applied Technology and Computing Science Journal*, 7(2), 89–96. <https://doi.org/10.33086/atcsj.v7i2.1553>
- Wardana, R., Putri, K. A. M., & Fatati, K. (2025). Good Governance di Era Digital: Pemerintah Kabupaten Sumedang Sebagai Model Transformasi Pelayanan Publik. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 7(1), 66–80. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i1.5094>

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Sage Publications.